

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

1.1 Grand theory : teori yang melandasi penelitian

1.1.1 Teori *Stewardship* Pemerintah

Dari maksud penyajian Laporan Keuangan adalah memberi informasi posisi, arus kas ataskinerja keuangan yang berguna untuk konsumen pelaporan keuangan tersebut sebagai pengambil kebijakan dalam keputusan ekonomi dan sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap pihak *stewardship* atas penggunaan dana keuangan yang dipercayakan kepada mereka (Khasanah,2014).

Bentuk pertanggungjawaban ditujukan dengan penyajian hasil yang tercantum sasaran utama guna keperluan dalam organisasi. Diteori ini menjelaskan bawasannya pemerintah yang membantu Masyarakat/kreditur. Masyarakat sangat membutuhkan berita supaya bisa mengawasi berjalannya Pemerintah. Pengungkapan laporan keuangan diharuskan diungkapkan Pemerintah sesuai standar. Masyarakat mempunyai akses informasi yang lebih dibanding serta bertanggungjawab dalam mengelola amanat dari rakyat maka pemerintah perlu memiliki kesadaran untuk mewujudkan pelaporan keuangan yang transparansi serta akuntabilitas. Dengan kesadaran tersebut sebagai pegawai pemerintah yang patuh dan maupun kepatuhan dalam kepentingan politik agar terpilih dalam pemilu berikutnya, dan usaha dalam mendapatkan kepercayaan dari pihak publik (Khasanah 2014).

Teori *stewardship* ini mengasumsi hubungan yang sangat kuat antar kesuksesan organisasi dengan hasil kerja perusahaan, sehingga fungsi utilitas sepenuhnya berhasil.

1.2 Variabel – variabel Peneliti

2.2.1 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah(LKPD)

LKPD merupakan asersi pihak manajemen dalam pemerintah kabupaten atau kabupaten dan kota yang memberikan informasi guna pengambilan keputusan dalam mewujudkan akuntabilitas.(Arfianti, 2011 dalam Khasanah 2014).

Sesuai PPno. 71 tentang SAP“ laporan keuangan dan transaksi suatu entitas terlapor yang tersusun biasa disebut laporan keuangan”. Pada tahap perkembangan pemerintah berusaha untuk melakukan GCG yang pelaksanaannya dirasa masih kurang. Hal tersebut terlihat dari fenomena di tahun 2004 dimana kasus korupsi banyak terjadi dengan alasan studi banding, banyak terjadi pengusuran, serta manipulasi dana anggaran (Wiratraman, 2009 dalam Hendro Sumarjo, 2010).

2.2.2. Standar Akuntansi Pemerintah

Standar akuntansi merupakan dasar acuan dalam pelaporan keuangan kepada pihak dengan mempunyai otoritas yang tertinggi (Halim &Kusufi, 2012). Sedangkan SAP merupakan standar kegiatan akuntansi dalam pemerintah yang sesuai UU No. 71 tahun 2010 sebagai standarisasi akuntansi dalam pemerintahan yang ditetapkan. SAP di butuhkan untuk menyusun laporan pelaksanaan serta pertanggungjawabanAPBN/APBD. SAP adalah persyaratan mempunyai dasar

hukum dalam upaya peningkatan kualitas sajian laporan keuangan dari Pemerintah Indonesia. Standar akuntansi merupakan dasar acuan dalam pelaporan keuangan kepada pihak dengan mempunyai otoritas yang tertinggi (Halim & Kusufi, 2012). Sedangkan SAP merupakan standar kegiatan akuntansi dalam pemerintah yang sesuai UU No. 71 tahun 2010 sebagai standarisasi akuntansi dalam pemerintahan yang ditetapkan. SAP di butuhkan untuk menyusun laporan pelaksanaan serta pertanggungjawaban APBN/APBD.

2.2.3. Ukuran Pemerintah Daerah

Pengelolaan keuangan yang lebih besar dan kompleks, sehingga Pemerintah Daerah akan mendapat pengawasan yang lebih. Pemerintah daerah melaporkan serta memberikan publikasi informasi keuangan secara cepat, mudah, dan memakan biaya yang lebih ringan melalui internet pada website pemerintahan resminya.

2.2.4. Temuan Audit

Untuk meningkatkan laporan keuangan yang transparan dan akuntabilitas maka laporan keuangan perlu di audit oleh BPK. Item dalam pengungkapan temuan Audit BPK merupakan kasus temuan BPK dalam tindakan audit laporan keuangan pemerintah daerah terhadap pelanggaran yang ada pada pemerintahan daerah terhadap ketentuan pengendalian intern maupun terhadap ketentuan yang berlaku. Audit keuangan oleh BPK meliputi pemeriksaan dan keuangan, pemeriksaan alur kinerja pemerintah daerah serta pemeriksaan dengan tujuan tersendiri (Khasanah 2014).

2.2.5. Umur Pemerintah

Pemerintah Daerah yang memiliki usia jauh diatas Pemerintah Daerah lainnya akan memiliki pengalaman lebih dan berkemampuan lebih dalam penyajian laporan keuangan yang wajar sesuai dengan SAP Hasil laporan pada periode tertentu serta hasil penilaian akan diperbaiki agar dapat disiapkan LKPD tahun berikutnya. Syafitri (2012) umurdaerah sebagai umur administrasi pemerintah daerah yang di peroleh tahun di bentuk Pemerintah yang di bentuk sejak tahun di bentuknya Pemerintahan berdasarkan peraturan UU. Umur dapat dinyatakan bila sudah 1tahun.

2.2.6. Leverage

Rasio leverage adalah perbandingan yang menghitung antara hubungan total asset dan ekuitas. Kreditur sebagai pemegang dana aset entitas. Aset didanai oleh entitas dengan ekuitas yang di miliki oleh kreditur.

Perusahaan dengan rasio leverage besar memiliki tingkat rasio yang besar juga. Semakin tinggi proporsi aset yang didanai dengan utang, maka rasio leverage sehingga pengungkapan aktivitas pendanaan juga semakin tinggi.

2.2.7 Intergovernmental revenue

DiIndonesia, *intergovernmental revenue* (dana perimbangan) tidak disediakan langsung pemerintah pusat harus ada laporan dalam bentuk LKPD guna melaksanakan akutanbilitas. *Intergovernmental revenue* berasal dari APBN yang ditunjukan ke daerah otonom guna memberi dana untuk mencukupi keperluan desa untuk pelaksanaan desentralisasi. Penetapan *Intergovernmental revenue* di Indonesia setahun sekali

2.2.8 Kekayaan Daerah

Kekayaan Pemerintah daerah menggambarkan tingkat kemakmuran daerah itu sendiri.kekayaan daerah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah/ PAD (pajak dan Restribusi daerah)

Melaksanakan kewajiban dalam melakukan pembayaran pajak serta retribusi daerah, sehingga pihak Pemerintah daerah berniat untuk menjalankan transparansi dan akuntabel dalam pengungkapan laporan keuangan.

2.3 Penelitian terdahulu

Berikut daftar tabel dari peneliti-peneliti terdahulu yang penulis gunakan sebagai acuan penelitian :

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti Dan tahun penelitian	Judul Penelitian	Variabel peneliti dan teknik analisis	Hasil penelitian
1.	Ghaniyyu Mintotik Waliyyan, Amir Mahmud, 2013	Pengaruh karakteristik pemerintah terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah di Indonesia	Variabel Dependen :Tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah di Indonesia. Variabel Independen : Size,umur pemda,temuan audit, leverage, <i>Intergovernmental revenue</i> . Tehnik Analisis : Analisis regresi linier berganda.	Umur pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan LKPD, sedangkan variabel <i>size</i> , temuan audit, leverage, dan <i>intergovernmental revenue</i> tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan LKPD
2.	Khasanah dan Rahardjo,	Pengaruh karakteristik,	Variabel Dependen: Tingkat	Hasil penelitian me menyimpulkan

	2014	Kompleksitas dan temuan audit terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah	pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah. Variabel Independen : karakteristik, Kompleksitas dan temuan audit. Tehnik Analisis : Analisis regresi data panel.	bahwa Total aset dari kategori karakteristik pemerintah dan jumlah SKPD dari kompleksitas pemerintah berpengaruh signifikan, sedangkan tingkat ketergantungan, umur pemerintah daerah, ukuran legislatif dan temuan audit tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan LKPD.
3.	Setyaningrum dan Syafitri, 2012	Analisis pengaruh karakteristik pemerintah daerah terhadap laporan keuangan pemerintah daerah	Variabel Dependen: Tingkat pengungkapan laporan keuangan. Variabel Independen : karakteristik Pemerintah Daerah, yaitu ukuran Pemerintah Daerah, ukuran legislatif, umur administratif Pemerintah Daerah, kekayaan Pemerintah Daerah, diferensiasi fungsional, spesialisasi pekerjaan, rasio kemandirian	Umur administratif pemerintah daerah, kekayaan pemerintah daerah, dan ukuran legislatif memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pengungkapan LKPD, sedangkan <i>intergovernmental revenue</i> memiliki pengaruh negatif yang signifikan. Ukuran pemerintah daerah, diferensiasi fungsional, spesialisasi

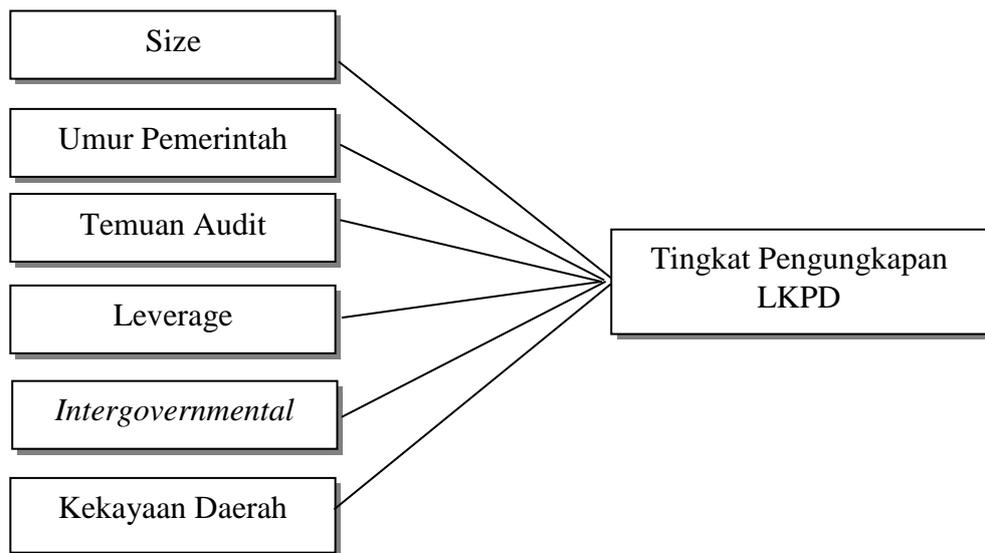
			keuangan daerah, dan <i>intergovernmental revenue</i> . Tehnik Analisi : uji korelasi dan regresi	pekerjaan, rasio kemandirian keuangan daerah dan pembiayaan utang terbukti tidak mempunyai pengaruh terhadap tingkat pengungkapan LKPD.
4.	Hendriyani dan Tahar , 2015	Analisa faktor yang mempengaruhi tingkat cara mengungkapkan laporan keuangan pemprov di Indonesia	Variabelterikat(Dependen) : Tingkat cara mengungkapkan laporan keuangan pemprov di Indonesia. Variabelbebas(Independen) :Temuan audit, jumlah penduduk, tingkat ketergantungan , pendapatan asli daerah dan belanja modal. Tehnik Analisis : analisis regresi berganda.	Belanja modal dan total penduduk memberikan efek positif yang signifikan pada tingkat pengungkapan dalam laporan keuangan dari pemerintah provinsi di Indonesia
5.	Ayu Dewi Ratnasari, 2016	Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Temuan Audit Bpk Ri Terhadap Tingkat Pengungkapan Wajib Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Variabel Dependen : tingkat pengungkapan wajib laporan keuangan pemerintah daerah. Variabel Independen : ukuran pemerintah, temuan audit, dan <i>intergovernmental revenue</i> ,kekayaan daerah,dan rasio kemandirian. Tehnik Analisis : analisis regresi berganda.	ukuran pemerintah daerah,temuan audit dan <i>intergovernmental revenue</i> yang berpengaruh positif dan signifikan kekayaan daerah, dan rasio kemandirian keuangan daerah tidak berpengaruh.

Sumber : Dari beberapa jurnal

1.3 Konsep Pemikiran dan Pengembangan Hipotesis

1.3.1 Pengembangan Hipotesis

Berdasarkan pernyataan yang dipaparkan, ditarik kesimpulan konsep pemikiran sebagai berikut :



Gambar 2.1.
Konsep Pemikiran

Kerangka pemikiran teoritis di atas menjelaskan bahwa ada enam variabel independen yaitu Size, Umur pemerintah, Temuan Audit, *Leverage*, *Intergovernmental revenue*, dan Kekayaan Daerah yang berpengaruh terhadap satu variable terikat (dependen) yaitu LKPD.

1.3.2 Pengembangan Hipotesis

Pengembangan hipotesis dalam penelitian ini dilakukan dalam rangka menjawab rumusan dalam menguji karakteristik Pemerintah Daerah yang mempengaruhi pengungkapan LKPD di Jawa Tengah. Karakteristik yang

dimaksud adalah ukuran, umur, temuan audit , *leverage*, *intergovernmental revenue* serta jumlah kekayaan daerah. Berikut ini merupakan pengembangan hipotesis yang di lakukan :

1.3.2.1 Pengaruh Size terhadap tingkat pengungkapan LKPD

Pemerintah daerah dengan ukuran lebih besar dibanding dengan Pemerintah daerah lainnya akan dinilai lebih berpengalaman dan lebih handal dalam menyajikan pelaporan keuangan dengan cara yang lebih wajar dan sesuai SAP. Pemerintah daerah dengan ukuran besar juga akan lebih kompleks dalam mengelola keuangan sehingga pemerintah tersebut dalam kegiatan pengelolaannya pemda tersebut dapat mengurangi asimetri informasi dari kegiatan pengelolaan keuangan sebagai bentuk akuntabilitas publik.

Lewat cara mengungkapkan dan menyajikan yang lebih banyak dalam dan akurat tentang laporan keuangan. Hasil Penelitian yang di lakukan oleh Setyaningrum dan Syafitri (2012) menggambarkan bahwa usia suatu pemda berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan LKPD. Berdasarkan uraian diatas maka dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut :

H1 : Size bernilai positif terhadap tingkat pengungkapan LKPD

1.3.2.2 Pengaruh umur pemerintah terhadap tingkat pengungkapan LKPD

Umur organisasi adalah gambaran lama suatu organisasi tersebut melangsungkan kegiatan dalam pemerintahannya. Pemerintah daerah yang memiliki usia administrasi lama dalam penyajian dan pelaporan keuangan akan dilakukan secara wajar dan disesuaikan.

Bentuk pengaruh ini terbentuk karena penyajian laporan keuangan pada periode sebelumnya yang diaudit BPK menghasilkan evaluasi dan berlanjut pada

tindak lanjut dalam usaha memperbaiki penyajian LKPD pada tahun anggaran berikutnya (Setyaningrum dan Syafitri, 2012). Menurut hasil penelitian Setyaningrum dan Syafitri (2012), Khasanah (2014) menunjukkan bahwa variabel umur sebuah pemda berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan LKPD. Dari uraian hipotesis tersebut, maka diambil pernyataan H2 sebagai berikut :

H2 : Ukuran pemerintah daerah bernilai positif terhadap tingkat pengungkapan LKPD.

1.3.2.3 Pengaruh temuan audit terhadap tingkat pengungkapan LKPD

Kasus-kasus temuan BPK pada penyajian LKPD. Untuk kasus ini BPK hendak meminta kolerasi, peningkatan temuan, dan pengungkapannya. maka, dapat ditarik kesimpulan semakin besar nilai temuan semakin besar pula nilai pengungkapannya.

H3 : Temuan audit bernilai positif terhadap tingkat pengungkapan LKPD.

1.3.2.4 Pengaruh *Leverage* terhadap tingkat pengungkapan LKPD.

Sesuai pemikiran dari Sudarmaji dan Sularto dalam Sumarjo (2010) yang menyatakan *leverage* adalah nilai yang berfungsi agar mengetahui besar nilai aktiva terbiayai dengan perolehan hutang. Hutang yang dimaksudkan berasal dari kreditor bukan dari pihak investor.

H4 : *Leverage* bernilai positif terhadap tingkat pengungkapan LKPD

1.3.2.5 Pengaruh *Intergovernmental revenue* terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah.

Di Indonesia *Intergovernmental revenue* di kenal dengan dana perimbangan. Dana perimbangan merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah dalam pelaksanaan

desentralisasi. Pengawasan yang dilakukan pemerintah pusat dengan membentuk Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang melakukan fungsi pengawasan keuangan internal. Patrik (2007) dalam Sumarjo (2010) menyatakan sebagai salah satu pendapatan pemerintah daerah sebagai berasal dari transfer dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk membiayai operasi pemerintah daerah.

H5 : *intergovernmental revenue* berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah.

1.3.2.6 Pengaruh kekayaan daerah terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah.

Bila suatu kekayaan dalam Pemerintah semakin besar maka tingkat pengungkapan laporan keuangannya akan semakin meningkat pula. Dengan meningkatnya pengungkapan tersebut maka Pemerintah daerah juga akan semakin besar menanggung biaya pengawasan.

Hal tersebut dilakukan karena Pemerintah daerah dituntut masyarakat untuk dapat menyajikan laporan keuangan secara transparan serta mampu mengurangi asimetri dalam antara pemerintah dengan masyarakat penyajian informasi dalam bentuk laporan keuangan tersebut. Menurut penelitian Pratama dkk (2015) bahwa kekayaan pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah.

H6 : Kekayaan daerah berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah.